

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN NILAI INFORMASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG

by Yuniep Mujati Suaidah

Submission date: 29-Jun-2020 01:31PM (UTC+0700)

Submission ID: 1351211176

File name: Pengaruh_Akuntabilitas,_Transparansi_Dan_Nilai_Informasi.rtf (207.17K)

Word count: 3654

Character count: 26267

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN NILAI
INFORMASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

Yuniep Mujati S

STIE PGRI Dewantara Jombang

Nissa Rahmawati

STIE PGRI Dewantara Jombang

Tyas Winedar

STIE PGRI Dewantara Jombang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Nilai Informasi Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi observasi dan studi pustaka. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tepatnya di DPPKAD Kabupaten Jombang dengan jumlah 110 orang. Jumlah sampel sebanyak 30 orang tenaga bagian akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel bebas yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi dan nilai informasi secara parsial berpengaruh sangat nyata (*high significant*) terhadap Pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang.

Kata kunci : akuntabilitas, transparansi, nilai informasi, pelaporan keuangan pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Pemerintah merupakan organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik di Indonesia didefinisikan sebagai organisasi yang menggunakan dana masyarakat (Bastian, 2006). Karakteristik dari organisasi sektor publik ialah memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya, melalui aktivitas pelayanan publik yang didanai dari dana masyarakat, pinjaman, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pemerintahan daerah merupakan bagian dari organisasi sektor publik. Jones dan Pendlebury (2000) menggolongkan pemerintahan daerah (*local government*) dalam kategori

type B non-profit, yaitu organisasi non-laba yang memperoleh sumber daya finansial dalam jumlah signifikan dari sumber selain penjualan barang dan jasa.

Perhatian terhadap isu transparansi di Indonesia semakin meningkat dalam satu dekade terakhir ini. Salah satu indikatornya ialah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Menurut Mulyana (2006), faktor yang menyebabkan isu transparansi keuangan daerah semakin meningkat ialah krisis ekonomi yang telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Ditambah lagi desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundangundangan, maka akan menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh, seperti yang telah diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat kerugian negara pada tahun 2009 sebesar Rp 3,55 triliun akibat kelemahan system pengendalian intern dan ketidakpatuhan daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi atas 348 LKPD, terdapat 3.179 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan system pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Selain kelemahan SPI, hasil pemeriksaan atas 348 LKPD tahun 2009 juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 4.708 kasus senilai Rp 3,55 triliun.

Penelitian yang menguji faktor-faktor yang menentukan pelaporan keuangan telah banyak dilakukan, namun umumnya penelitian tersebut dilakukan di sektor swasta. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Laswad, dkk (2005) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan sejumlah pengungkapan di sektor publik belum banyak diteliti. Pernyataan senada juga diungkapkan Styles dan Tennyson (2007) bahwa hanya ada sedikit penelitian tentang institusi pemerintahan. Hal yang mirip juga terjadi di Indonesia. Penelitian tentang pengungkapan di sektor publik Indonesia terbilang relatif sedikit, beberapa diantaranya ialah penelitian Mulyana (2006) yang memeriksa penyajian neraca dan aksesibilitas laporan keuangan serta penelitian Lesmana (2010) yang

memeriksa karakteristik pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan wajib. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang pengungkapan pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan merupakan suatu bentuk pengungkapan informasi keuangan. Pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan (Ghozali dan Chariri, 2007). Menurut Hendriksen dan Breda (2002) ada bukti yang menunjukkan bahwa entitas enggan menambah luasnya pengungkapan keuangan tanpa adanya tekanan dari profesi akuntansi atau pemerintah. Beberapa alasannya ialah pengungkapan dapat memberi manfaat kepada pesaing serta seringkali diyakini bahwa investor tidak dapat memahami kebijakan dan prosedur akuntansi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Sesuai Pernyataan Nomor 1 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang penyajian laporan keuangan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 menginstruksikan kepada pemimpin instansi pemerintah, termasuk kepala daerah, untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. LAKIP berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun kegagalan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi serta agenda pembangunan daerah yang dijabarkan lagi melalui program-program pembangunan. Disamping itu, laporan ini juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Agency Theory

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas public sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horisontal).

Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Adapun fungsi akuntabilitas meliputi tiga unsur, yaitu (1) *providing information about decisions and actions taken during the course of operating entity*, (2) *having the internal parties review the information*, and (3) *taking corrective actions where necessary*.

Suatu entitas yang *accountable* adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor, atau masyarakat secara luas) *me-review* informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif (Sugijanto, *et al* (1995:6) dalam Ulum, 2001).

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. (Widodo, 2001 dalam Kharis, 2010). Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Yosa (2010) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan

seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Transparansi (*transparency*)

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Nilai Informasi

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*).

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : Ada pengaruh akuntabilitas, transparansi dan nilai informasi secara parsial terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jombang.
- H₂ : Ada pengaruh akuntabilitas, transparansi dan nilai informasi secara simultan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jombang.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Desain penelitian atau rancang bangun penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan penelitiannya. (Kerlinger, 1993:483). Dalam desain penelitian ini menggambarkan langkah langkah yang ditempuh penulis mulai dari penyusunan hipotesis sampai menganalisa data dan mengambil kesimpulan. Rancangan penelitian ini menggunakan jenis *Explanatory Research* yaitu penelitian yang menelaah hubungan kausal dua variabel melalui pengujian hipotesa yang ditetapkan sebelumnya .

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tepatnya di DPPKAD Kabupaten Jombang dengan jumlah 110 orang. Jumlah sampel sebanyak 30 orang tenaga bagian akuntansi. Pengambilan sampel (*sampling method*) terhadap responden dilakukan secara *purposive*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003 dalam Indriasari, 2008). Adapun criteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada DPPKAD, yang meliputi kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan. Jumlah kuesioner yang dikirim kepada responden sebanyak 30 kuesioner, yang didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden.

Definisi Operasional Variabel

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, yang diadaptasi dari Indriasari (2008) yang telah dikembangkan, yang masing-masing variabel diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, mempunyai skor 1, (2) Tidak Setuju, mempunyai skor 2, (3) Netral, mempunyai skor 3, (4) Setuju, mempunyai skor 4, dan (5) Sangat Setuju, mempunyai skor 5 (Sugiono, 2008:86). Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Prinsip ini menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*).

Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Nilai Informasi

Nilai informasi adalah kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) : 1) Relevan, 2) dapat dibandingkan; 3) dapat dipahami.

Teknik Analisis Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005:41).

Analisis Regresi Berganda

Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan nilai informasi secara simultan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jombang, maka penulis menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut.

$$Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji t dan uji F diasumsikan bahwa nilai residual memiliki distribusi normal. Oleh sebab itu Santoso (2001) menyatakan “untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau mendekati normal dan atau bias dianggap normal, jika bias maka akan dilakukan uji normality plot, yaitu suatu pengujian dengan menggunakan grafik PP-plot”.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolinieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Uji heterokedastisitas

Masalah yang sering muncul dalam analisis regresi berganda adalah heterokedastisitas. Ini timbul pada saat asumsi bahwa varian dari faktor alat adalah konstan untuk semua variabel bebas yang tidak terpenuhi. Jika varian tidak sama, dikatakan terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam model regresi di gunakan analisis residual yang berupa grafik dengan dasar pengambilan keputusan jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadilah heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di bawah angka 0 pada sumbu Y tidak terjadi heterokedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Hasil pengujian validitas yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS yang terlihat pada kolom *corrected item – total correlation* terhadap variable Pelaporan keuangan daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan teknologi informasi, Sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah ternyata seluruhnya adalah valid, karena lebih dari 0,361. Dari hasil pengujian reliabilitas diatas dapat diketahui bahwa reliabilitas variabel Akuntabilitas, Transparansi, Nilai informasi, Pengawasan keuangan daerah (X4) dan Pelaporan keuangan pemerintah (Y) berdasarkan pengujian reliabilitas dari instrumen, diketahui bahwa hasil pengujian variabel penelitian seluruhnya adalah reliabel karena telah melebihi angka 0,7.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dari hasil analisis yang dilakukan maka terlihat dari grafik yang telah terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksi Pelaporan keuangan daerah berdasarkan masukan variabel independen.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka

terdapat masalah multikolinearitas. Dari analisis yang dilakukan menunjukkan masing-masing variabel independen memiliki nilai *VIF* kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS dengan mengamati pola yang terdapat pada Scatterplot. Dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa uji heteroskedastisitas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk prediksi Pelaporan keuangan daerah berdasarkan masukan dari variabel bebasnya.

Pembahasan

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan, maka persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = -17.760 + 0,649X_1 + 0,503X_2 + 0,504X_3$$

Konstanta adalah -17.760 artinya bahwa Pelaporan keuangan daerah kabupaten Jombang sebelum dilakukan penelitian terhadap variabel-variabel penelitian maka pelaporan keuangan pemerintah daerah bernilai negatif yaitu -17.760. Artinya pelaporan keuangan pemerintah daerah belum baik.

Koefisien regresi Akuntabilitas = 0,649 bertanda positif ini berarti bahwa faktor akuntabilitas mempunyai hubungan yang positif dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang, dengan kata lain apabila akuntabilitas ditingkatkan satu satuan maka akan diikuti dengan peningkatan Pelaporan keuangan daerah Kabupaten Jombang yang positif sebesar 0,469 satuan, dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan.

Koefisien regresi Transparansi = 0,503 bertanda positif ini berarti bahwa transparansi mempunyai hubungan yang positif dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang, artinya mempunyai hubungan yang searah atau dengan kata lain apabila transparansi ditingkatkan maka akan diikuti dengan peningkatan Pelaporan keuangan daerah Kabupaten Jombang positif sebesar 0,503 satuan.

Koefisien regresi nilai informasi = 0,504 bertanda positif ini berarti bahwa nilai informasi mempunyai hubungan yang positif dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang, artinya mempunyai hubungan yang searah atau dengan kata lain apabila nilai informasi ditingkatkan satu satuan maka akan diikuti dengan peningkatan Pelaporan keuangan daerah Kabupaten Jombang positif sebesar 0,504 satuan.

Uji Parsial

Pengaruh Akuntabilitas terhadap variabel Pelaporan keuangan daerah (Y) secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.12 nilai t_{hitung} (2,808) lebih besar dari t_{tabel} (2,060), maka keputusannya adalah menolak H_0 dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Dari hasil uji signifikansi secara parsial bahwa terdapat pengaruh positif akuntabilitas terhadap Pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang, artinya akuntabilitas akan mempengaruhi Pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin akuntabel laporan maka akan berpengaruh terhadap peningkatan Pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang.

Pengaruh Transparansi terhadap variabel pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jombang (Y) secara parsial dapat dilihat pada tabel 4.12 nilai t_{hitung} (2,414) lebih besar dari t_{tabel} (2,060), maka keputusannya adalah menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jombang. Dari hasil uji signifikansi secara parsial bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan transparansi terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jombang, artinya informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan mempengaruhi pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jombang.

Pengaruh nilai informasi (X_3) terhadap variabel Pelaporan keuangan daerah (Y) secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.12 nilai t_{hitung} (2,315) lebih besar dari t_{tabel} (2,060), maka keputusannya adalah menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai informasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Dari hasil uji signifikansi secara parsial bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif nilai informasi terhadap Pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang, artinya informasi yang mempunyai nilai yaitu informasi yang relevan, andal, dapat dipertimbangkan dan dapat dipahami mempengaruhi.

Koefisien Korelasi dan Determinasi

Dari hasil perhitungan diketahui koefisien korelasi berganda (R) = 0,802 yang menunjukkan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat adalah sangat kuat. Sedangkan koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0,643, artinya bahwa variabel Pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jombang dapat dipengaruhi oleh variabel Akuntabilitas, Transparansi, Nilai informasi sebesar 64,3%, sedangkan sisanya sebesar 35,7% merupakan kontribusi variabel independen lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial, diperoleh bahwa semua variabel bebas yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi dan nilai informasi secara parsial berpengaruh sangat nyata (*high significant*) terhadap Pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Sedangkan variabel yang dominan berpengaruh terhadap Pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang adalah variabel akuntabilitas karena memiliki nilai *t* hitung terbesar dibandingkan variabel lain. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap Pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang.

Secara simultan variabel akuntabilitas, transparansi dan nilai informasi secara serempak berpengaruh sangat nyata (*high significant*) terhadap Pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Makna *high significant* menunjukkan bahwa Pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jombang sangat dipengaruhi akuntabilitas, transparansi dan nilai informasi. Semakin akuntabel dan transparan maka akan jelas nilai informasi dan semakin baik Pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang.

Saran

Pemerintah daerah hendaknya selalu mempersiapkan dan melakukan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang terpercaya dan handal dalam pelayanan public terutama yang terkait dengan pelaporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat lebih merasakan kenyamanan dan berpandangan positif terhadap perkembangan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Jombang karena akuntabilitas dan transparansinya sebuah pelaporan keuangan pemerintah.

Pemerintah selalu Menyediakan IT yang handal yang mampu menunjang pekerjaan pegawai dalam meningkatkan kinerjanya sehingga hasil capaian kerja pegawai lebih optimal.

Pemerintah harus selalu melakukan pengendalian secara intern dengan melakukan pengawasan yang melekat baik terkait dengan administratif maupun kwanitatif yakni sebaran keuangan daerah dan pelaporannya.

Mengupakan informasi ke public yang transparan dan memudahkan al perolehan informasi tentang keuangan pemerintah daerah melalui internat mau media massa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.
- Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, 2006. *Paparan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Erlina, 2008. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*, USU Press, Medan.
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, penerbit Erlangga, Jakarta.

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, penerbit Andi, Yogyakarta.

_____, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, penerbit Andi, Yogyakarta.

Munir Dasril, Henry Arys Djuanda, Hessel Nogi S.Tangkilisan, 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, penerbit YPAPI, Yogyakarta.

Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah Dalam Otonomi*, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekarwo, 2005. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Financial Governance*, cetakan pertama. Airlangga University Press, Surabaya.

Yani, Ahmad, 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, edisi revisi, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

_____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN NILAI INFORMASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG

ORIGINALITY REPORT

18%	14%	9%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%
★ Altofu Rohman, Aglis Andhita Hatmawan. "ANALISIS PENGARUH CITRA MEREK DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNA JASA PENGIRIMAN (Study Kasus Pada Pengguna Jasa JNE Express Across Nations Cabang Nganjuk)", Capital: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2018
Publication

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		